

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bram, Deni, 2014, *Politik Hukum Pengelolaan lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang.
- Collin, W. Robert, "Enviromental Justice in Oregon: It's the Law", *Enviromental Law*, Vol. 38, 2008, hlm. 414 dalam Wibisana, Andri Gunawan. "Keadilan dalam satu (Intra) generasi: Sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 2 (2017): 292-307.
- Creswell, John W, 2007, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Choosing Among Five Approaches, 2nd edn, Sage, California.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2008, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartodihardjo, H., 2004. *Masalah Kerusakan Fungsi Kawasan Lindung: Menimbang Nilai Ekonomi Hutan dalam Keputusan Pemerintah Daerah*.
- Khakim, A., 2005. *Pengantar hukum kehutanan Indonesia: dalam era otonomi daerah*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kuehn, R. Robert, "A Taxonomy of Enviromental Justice", *Enviromental Law Reporter*, Vol.30, 2000, dalam dalam Andri Gunawan Wibisana. "Keadilan dalam satu (Intra) generasi: Sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 2 (2017):294.
- Langhelle, Oluf, 2000, "Sustainable Development and Social Justice: Expanding the Rawlsian Framework of Global Justice", *Enviromental Values*, Vol. 9, No.3.

- Lestari, Sulistyani Eka and Hardianto Djanggih, 2019, "Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 2.
- Millner, Felicity, 2011, "Access to Enviromental Justice", *Deakin Law Review*, Vol.16, No.1, hlm 191.
- Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi, 2020, "Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia.", *Mozaik Humaniora* 20, No. 1.
- Nakita, Clearestha dan Fatma Ulfatun Najicha. "Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 92-103.
- Nur, A.C. and Guntur, M., 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Publisher UNM, Makasar.
- Purwendah, E.K., 2019. Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), pp.139-151.
- Riyanto, Sigit dkk, 2020. "Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)", *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kertas Kebijakan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.
- Rosadi, Otong, 2012, *Qua Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Said, M. Yasir dan Ifrani, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Spelt, N. M. dan J. B. J. M. Ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M Hadjon, Penerbit Yuridika, Surabaya.
- Suaib, Hermanto, A. Sakti RS Rakia, Arie Purnomo, and Hayat M. Ohorella, 2022, *Pengantar Kebijakan Publik*, Humanities Genius.

Suryatmojo, Hatma, 2006, "Peran Hutan Sebagai Penyedia Jasa Lingkungan." Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutedi, A., 2010. Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik.

Sutoyo, "Keanekaragaman Hayati Indonesia Suatu Tinjauan : Masalah Dan Pemecahannya Sutoyo" 10 (2010): 101–6.

Wahab, Abdul S., 2008, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Wibisana, Andri Gunawan. "Keadilan dalam satu (Intra) generasi: Sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 2 (2017): 292-307

Winarno, Budi, Kebijakan Publik Teori dan Proses.

Yusuf, Abdul Muis dan Muhammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Kehutanan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal, Makalah, dan Laporan

Afinnas, M.A.A., 2023, October. Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 1, No. 3, pp. 47-61).

Apriansyah, Nizar, "Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (Role of Government in Legal Policy-Making).", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 2, 2017.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019.

Berdasarkan data Kesatuan Lingkungan Hidup dan UNESCO, 1992.

Hasil Wawancara dengan Dr. Rohman, S.Hut.MP., Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 17 Mei 2024.

- Hasil Wawancara dengan Sadam Afian Richwanudin S.H., Peneliti pada Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Berkelanjutan pada 12 Mei 2024.
- Ismail, M. H., and Ahmad Sofwani, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.", JRP (Jurnal Review Politik) 6, No. 2, 2016.
- Justianto, Agus, Dodik Ridho Nurrochmat, dan Hariadi Kartodihardjo, "Analisa pemangku kepentingan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kehutanan.", Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 12, No. 3, 29294, 2015.
- Najicha, Fatma Ulfatun, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan.", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 5, No. 1, 2017.
- Nugroho, A.W., 2021. Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Pasca-Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 7(2).
- Nugroho, Wahyu, and Erwin Syahrudin. "Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Disektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis).", Jurnal Hukum dan Pembangunan 51, No. 3, 2021.
- Pambudhi, H.D. and Ramadayanti, E., 2021. Menilai kembali politik hukum perlindungan lingkungan dalam uu cipta kerja untuk mendukung keberlanjutan ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), pp.297-322.
- Purwendah, E.K., 2019. Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2).
- Rahmadanty, Atika, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Kebijakan pembangunan kesatuan pengelolaan hutan di Indonesia: suatu terobosan dalam menciptakan pengelolaan hutan lestari.", Al-Adl: Jurnal Hukum 13, No. 2, 2021).
- Sharon, Grace, "Teori Wewenang Dalam Perizinan.", Jurnal Justiciabelen 3, No. 1, 2021).

Takarendehang, Roberto, Calvyn FA Sondak, Erly Kaligis, Deslie Kumampung, Indri S. Manembu, and Unstain NWJ Rembet, "Kondisi ekologi dan nilai manfaat hutan mangrove di desa Lansa, kecamatan Wori, kabupaten Minahasa Utara.", *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis* 2, 2018.

Wardana, A., 2013. Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi. *Jurnal Advokasi*, 3(2), p.29371.

C. Artikel Internet

Ade Sugiharto, "Arah Kebijakan Multiusaha Kehutanan", Arah Kebijakan Multiusaha Kehutanan (forestdigest.com), diakses pada 19 April 2024.

Auriga Nusantara, "*Deforestasi Indonesia 2023*", Downloads - Simontini, diakses pada 7 Juni 2023.

Administrator, "Perppu Cipta Kerja, Ciptakan Iklim Kepastian Investasi", Indonesia.go.id - Perppu Cipta Kerja, Ciptakan Kepastian Iklim Investasi, diakses pada 18 April 2024.

Agus Justianti, "Multiusaha Kehutanan: Optimasi Pemanfaatan Kawasan Hutan", Multiusaha Kehutanan: Optimasi Pemanfaatan Kawasan Hutan (mediaindonesia.com), diakses pada 13 Maret 2024.

BBC News, Deforestasi: Negara mana saja yang paling banyak memabat hutan?, Deforestasi: Negara mana saja yang paling banyak memabat hutan? - BBC News Indonesia, diakses pada 30 April 2024.

Bernadheta Aurelia Oktavia, "Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan UU Cipta Kerja", Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan UU Cipta Kerja (hukumonline.com), diakses pada 9 Juni 2024.

Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Lestari, *Infografis Perizinan Berusaha*, Satu data PHL INFOGRAFIS - SATU DATA SI PHL (menlhk.go.id), diakses pada 10 Juni 2024.

DPMPTKP, Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan dalam OSS, DPMPTSP - Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan dalam OSS (kulonprogokab.go.id), diakses pada 14 Juni 2024.

Fakultas Kehutanan IPB dalam Agus Sugihato, “Arah Kebijakan Multiusaha Kehutanan”, Arah Kebijakan Multiusaha Kehutanan (forestdigest.com), diakses pada 20 April 2024.

Hariadi Kartodihardjo, *Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (forestdigest.com), diakses pada 14 Juni 2024.

Hermudananto, “Multiusaha Kehutanan:Potensial Naikkan Devisa dan Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan”, Multiusaha Kehutanan: potensial naikkan devisa dan pendapatan masyarakat sekitar hutan (theconversation.com), diakses pada 19 April 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari, Jakarta: (2024), [publikasi_file_1708933728.pdf](#) (menlhk.go.id), diakses pada 6 Mei 2024.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera Peta Jalan untuk Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi, 20160510161543.Roadmap_Executive_Summary_ID.pdf (bappenas.go.id), diakses pada 23 April 2024.

Lintang Catur Pratiwi, “Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Sebagai Perizinan untuk Kegiatan Berusaha di Kawasan Hutan”, PBPH Sebagai Perizinan Kegiatan Berusaha di Kawasan Hutan - PT Citra Melati Alam Prima - Konsultan Lingkungan Hidup Terbaik, diakses pada 20 April 2024.

Mikaela Weissen dan Liz Goldman, Kerusakan Hutan Hujan Primer Meningkat Sebesar 12% dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020, Apa yang Terjadi pada Hutan Global pada 2020| Global Forest Watch Blog, diakses pada 30 April 2024.

Pramono Dwi Susetyo, “Multi Usaha Kehutanan, Konsepnya kuat tapi Implementasinya Lemah”, Multi Usaha Kehutanan (MUK), Konsepnya Kuat tetapi Implentasi Lemah (kompas.com), diakses pada 20 April 2024.

Rama Maulana, “Multiusaha Kehutanan Makin Menjanjikan”, Multiusaha Kehutanan Makin Menjanjikan (forestdigest.com), diakses pada 18 April 2024.

Redaksi Forest Digest, Kunci Sukses Multiusaha Kehutanan: Melibatkan Masyarakat, Kunci Sukses Multiusaha Kehutanan: Melibatkan Masyarakat (forestdigest.com), diakses pada 4 Mei 2024.

Redaksi Forest Digest, Multiusaha: Jawaban Atas Pengelolaan Hutan Lestari, Multiusaha: Jawaban Atas Pengelolaan Hutan Lestari (forestdigest.com), diakses pada 1 Mei 2024.

Redaksi Forest Digest, Penyebab Utama Deforestasi dan Degradasi Lahan, Penyebab Utama Deforestasi dan Degradasi Lahan (forestdigest.com), diakses pada 1 Mei 2024.

Retno Suryandari, Ekonomi Hijau, Ekonomi Hijau – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, diakses pada 23 April 2024.

R. Oszaer, Pembangunan Hutan Berbasis Ekosistem dan Masyarakat, 2011, http://indonesiaforest.webs.com/hutan_ro.pdf, diakses pada 17 Oktober 2023.

Yayasan Konservasi Alam Indonesia, Siaran Pers: Kelola Hutan Alam Produksi Secara Lestari, Kelola Hutan Alam Produksi Secara Lestari (ykan.or.id), diakses pada 6 Mei 2024.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, TLN No.66341 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK-Setjen/2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.